

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2014 mengenai otonomi daerah, visi pemerintah daerah dalam era desentralisasi adalah berusaha menciptakan iklim yang memungkinkan bagi rakyat untuk berusaha dan membangun dirinya secara otonom agar tercipta kesejahteraan masyarakat, sehingga dengan sendirinya akan memperbaiki perekonomian daerah. UUD 1945 memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab mengatur dan menjaga kesejahteraan sosial.

Pada saat ini, telah banyak program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Seperti program bantuan sosial bertujuan untuk memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan contohnya tunjangan keluarga, program pendidikan gratis atau subsidi pemerintah menyediakan program pendidikan gratis atau subsidi untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi masyarakat, terutama untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah contohnya penghapusan biaya sekolah, program pemberdayaan ekonomi pemerintah dapat meluncurkan program pemberdayaan ekonomi untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja contohnya bantuan modal usaha (Anggleni, 2018).

Kehidupan yang sejahtera menjadi dambaan setiap orang untuk memenuhi hasrat ekonominya berupa segala kebutuhan baik sandang, pangan dan papan dalam menjalani kehidupan

sehari-harinya. Upaya yang dilakukan agar tujuan tercapai masyarakat akan terus berusaha melakukan berbagai usaha. Upaya yang dapat ditempuh yaitu dengan mendirikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM merupakan salah satu jenis usaha kecil yang sangat berperan dalam peningkatan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat. UMKM mampu bertahan dalam situasi apapun untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ketangguhan UMKM terbukti saat terjadi krisis moneter tahun 1998 banyak usaha-usaha besar yang berjatuh namun UMKM tetap bertahan dan bahkan bertambah jumlahnya (Srijani, 2020).

Peran penting pemberdayaan UMKM semakin terasa dalam proses pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Pada awalnya, keberadaan kegiatan UMKM dianggap sebagai sumber penting dalam penciptaan kesempatan kerja dan motor penggerak utama pembangunan ekonomi daerah di pedesaan. Namun, pada era globalisasi saat ini dan mendatang, peran keberadaan kegiatan UMKM semakin penting. Upaya yang merupakan pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya merupakan konsep pemberdayaan.

Tujuan pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2008 terdiri atas tiga aspek yaitu mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro kecil dan menengah agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; meningkatkan peran usaha mikro kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia

dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia (Saleh, 2018).

Modal merupakan salah satu faktor produksi yang dapat mempengaruhi pendapatan namun bukan satu-satunya faktor yang dapat meningkatkan. Sumber modal UMKM berasal dari kredit dari bank, modal pribadi, campuran antara keduanya, atau sumber kredit informal lain. Modal tidak selalu identik dengan uang, namun dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai untuk menghasilkan barang atau jasa. Dengan modal yang tinggi akan diikuti dengan kemampuan memproduksi hasil usaha yang lebih banyak, sehingga akan meningkatkan pendapatan (Rahmah et al., 2020).

Peningkatan pendapatan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa strategi seperti peningkatan kualitas produk atau layanan, ini berfokus pada pengembangan produk atau layanan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasar, selanjutnya ekspansi pasar dengan ini bisa dilakukan dengan cara membuka cabang baru, dan mengikuti program pemerintah, pemerintah sering menyediakan program dukungan dan insentif bagi pelaku UMKM, seperti pelatihan, pendanaan, atau bantuan teknis, yang dapat membantu meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan bisnis.

Pemerintah kota Bukittinggi membuat suatu program untuk meningkatkan tarif perekonomian masyarakat dengan dasar tingginya tingkat kebutuhan UMKM terhadap modal. Melalui kerjasama pemerintah Kota Bukittinggi dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang Bukittinggi selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu dengan mengeluarkan Tabungan Utsman. Dasar hukum pelaksanaannya adalah Pewako No 7 tahun 2022 tentang tata

cara pemberian dan pertanggung jawaban subsidi. Melalui Tabungan Utsman selain menabung masyarakat bisa menerima pinjaman di muka dengan akad pinjaman syariah yaitu akad Murabahah. Dengan akad Murabahah maka tidak ada riba di dalamnya, dan masyarakat dapat menabung untuk pembayaran cicilan pokoknya setiap harinya.

Dalam Pewako No 7 Tahun 2022 Pasal 12 menjelaskan tentang seluruh biaya yang timbul akibat pinjaman yang dilakukan masyarakat melalui Tabungan Utsman ditanggung Pemerintah kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Khusus untuk bagian permodalan UMKM, nasabah hanya akan membayar sesuai dengan harga pokok pembiayaan atau nilai objek Murabahah yang diberikan oleh PT BPRS Jam Gadang Syariah tanpa dikenakan biaya apapun, artinya sistem pembiayaan tabungan Utsman Bukittinggi dilakukan tanpa adanya biaya tambahan seperti biaya agunan, biaya margin, dan biaya administrasi. Nantinya ketiga biaya di atas akan dibiayai oleh Pemerintah Kota Bukittinggi melalui APBD Kota Bukittinggi. Jika seandainya ada uang nasabah yang berlebih ketika membayar angsuran maka akan langsung masuk ke tabungan Nasabah.

Tabungan Utsman ini telah menjadi program unggulan kota Bukittinggi dengan bukti Bukittinggi adalah kota yang pro dengan ekonomi masyarakat. Terbukti melalui Tabungan Utsman ini Bukittinggi mendapatkan tiga penghargaan sekaligus dari TOP BUMD Awards 2023 yaitu Walikota Bukittinggi Erman Safar menerima penghargaan kategori Top Pembina BUMD 2023, BPRS Jam Gadang meraih TOP BUMD Awards 2023 bintang 5, dan Direktur Utama BPRS Jam Gadang Feri Irawan meraih TOP CEO BUMD 2023.

Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) bapak Gusrizal Gazahar menyampaikan bahwa selama tahun 2022 pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap BPRS untuk memastikan terpenuhinya prinsip kepatuhan Syari'ah. Syariah Compliance (kepatuhan) dalam operasional

BPRS, DPS secara intens dan berkesinambungan berkomitmen untuk senantiasa memberikan saran dan nasihat kepada manajemen agar senantiasa mematuhi prinsip dan nilai syariah serta tata kelola perusahaan yang baik dalam mengelola usaha (Alamsyah, 2023).

Syarat umum untuk bisa mendapatkan manfaat dari Tabungan Utsman ini yaitu Warga Negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun, memiliki identitas yang sah seperti KTP atau SIM Bukittinggi, setoran awal berjumlah Rp. 10.000, tidak memiliki riwayat kredit macet atau catatan buruk di bank lain, rincian kegunaan pinjaman, lokasi usaha harus di Bukittinggi, dan menandatangani perjanjian pembukuan rekening Tabungan Utsman (Yursil, 2022).

Dalam satu tahun perjalanan Tabungan Utsman ini tercatat hingga Maret 2023 realisasi pinjaman yang sudah diberikan oleh BPRS Jam Gadang mencapai Rp. 21 miliar lebih untuk 2.747 nasabah dengan subsidi dana untuk margin yang sudah direalisasikan melalui APBD Kota sebesar Rp.2,5 miliar dan akan ditambah 500 juta lagi untuk dapat dimanfaatkan oleh 3000 nasabah (Badar, 2023). Tabungan Utsman menjadi percontohan di daerah lain karena dapat menyelamatkan dan mengembangkan UMKM dengan pembiayaan syariah. Para pelaku UMKM dapat menggunakan pembiayaan maksimal Rp 10 juta dengan margin nol rupiah (Alamsyah, 2023).

Melalui survey awal peneliti pada tanggal 10 Maret 2023 dengan salah seorang staf di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan kota Bukittinggi ada beberapa masalah umum yang dihadapi dalam program pemberdayaan UMKM melalui tabungan Utsman ini seperti keterbatasan sumber daya yang dialokasikan untuk program pemberdayaan UMKM, baik itu dalam hal anggaran maupun tenaga kerja, kekurangan sumber daya ini dapat mempengaruhi kemampuan program untuk memberikan dukungan yang efektif kepada UMKM. Selain itu kurangnya pemahaman dan keterampilan dari UMKM itu sendiri, dalam bidang ini dapat menjadi hambatan untuk pertumbuhan dan pengembangan UMKM, selanjutnya kurangnya akses ke pasar dan

jaringan, karena salah satu tujuan pemberdayaan UMKM adalah membantu mereka memperluas akses ke pasar dan jaringan bisnis yang lebih luas, program pemberdayaan harus membantu UMKM dalam membangun hubungan dan memperluas jaringan bisnis mereka.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi program pemberdayaan UMKM melalui tabungan utsman ini bisa dilihat dari (i) pertumbuhan jumlah UMKM, indikator ini dapat mengukur sejauh mana program pemberdayaan mampu mendorong pertumbuhan jumlah UMKM yang terlibat dalam program, (ii) peningkatan kualitas produk dan layanan, ini mengukur perubahan dalam kualitas produk dan layanan yang ditawarkan oleh UMKM setelah mengikuti program pemberdayaan UMKM, (iii) tingkat kepuasan UMKM, indikator ini mengukur tingkat kepuasan UMKM terhadap program pemberdayaan secara keseluruhan, bisa melalui survey maupun wawancara, UMKM dapat memberikan umpan balik tentang manfaat program dan masukan untuk perbaikan di masa mendatang .

Selanjutnya peneliti mengunjungi Pasar Bawah Bukittinggi dengan mewawancarai 10 nasabah yang telah memanfaatkan Tabungan Utsman ada beberapa kendala yang ditemukan terkait kinerja program pemberdayaan UMKM melalui Tabungan Utsman ini, peneliti menemukan adanya nasabah yang kesulitan dalam verifikasi pendaftaran karena salah satu syarat untuk mendaftar yaitu harus sudah memiliki usaha dan ini tidak sesuai dengan bagaimana kinerja program pemberdayaan UMKM seharusnya memiliki kesesuaian program dengan kebutuhan UMKM, jika program pemberdayaan UMKM tidak memperhitungkan kebutuhan UMKM secara tepat, program tersebut mungkin tidak memberikan manfaat yang signifikan (Saleh, 2018).

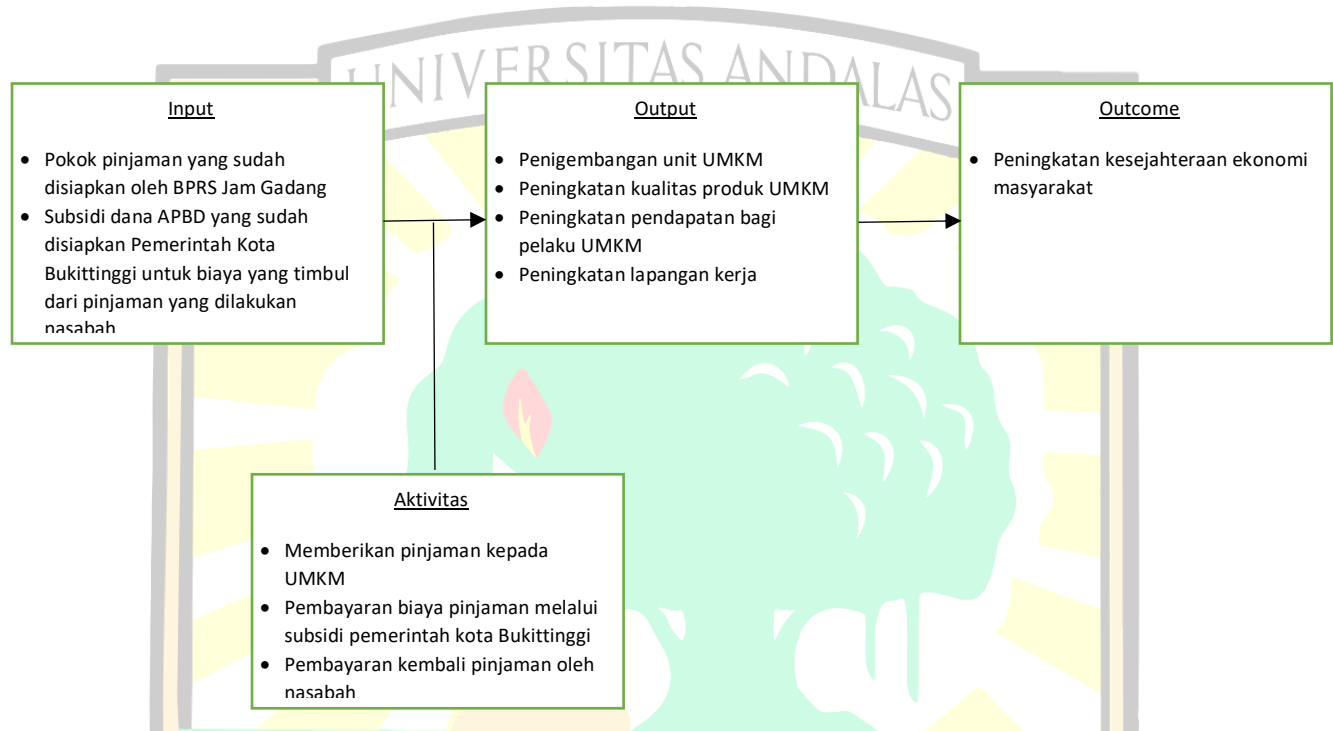
Peneliti juga menemukan keluhan nasabah terkait batas jumlah pinjaman hanya 10 juta untuk sekali pinjaman, ini juga sebenarnya tidak sesuai dengan bagaimana kinerja program pemberdayaan UMKM yang seharusnya yang tidak memiliki keterbatasan akses ke sumber daya,

dan sumber daya yang dimaksud disini adalah modal jika program pemberdayaan UMKM tidak mampu menyediakan akses yang memadai ke sumber daya ini, UMKM mungkin tetap mengalami kesulitan dalam mengembangkan dan memperluas usahanya.

Sejauh ini program tabungan Utsman belum dilakukan evaluasi terhadap kinerja programnya karena program ini masih tergolong program yang masih baru. Evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merealisasi atau mengimplementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan. Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil evaluasi program digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya. Evaluasi sama artinya dengan kegiatan supervisi. Kegiatan evaluasi/supervisi dimaksudkan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindak lanjut dari program yang telah dilaksanakan. Manfaat dari evaluasi program dapat berupa penghentian program, merevisi program, melanjutkan program, dan menyebarluaskan program.

Evaluasi program merupakan bagian dari akuntansi manajemen karena melibatkan penggunaan prinsip-prinsip dan alat-alat untuk melihat, mengukur dan menganalisis kinerja program. Evaluasi program memiliki beberapa model yang dapat digunakan untuk melihat efektifitas sebuah program seperti Model Logika Program, Model Input-Process-Output-Outcome, Model Balanced Scorecard, dan Model Evaluasi Responsif Gender. Dari beberapa model evaluasi, di dalam penelitian ini peneliti menggunakan Model Logika Program karena model ini membantu dalam merencanakan, mengelola dan mengevaluasi program dengan memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan sebab-akibat antara elemen-elemen program tersebut. Menurut Harry P.

Hatry bahwa Logic model merupakan sebuah model yang menggambarkan kontinum dari faktor yang relevan untuk sistem pengukuran kinerja (Hatry, 2006). Evaluasi Logic model memiliki beberapa komponen atau tahapan evaluasi yaitu inputs, activities, outputs, dan outcomes (Hatry, 2006).



Gambar 1.1 Logic Model Tabungan Utsman
Sumber : Diadaptasi di Hatry (2006)

Input atau masukan yang dibutuhkan untuk menjalankan program pemberdayaan UMKM melalui tabungan Utsman ini adalah pokok pinjaman yang sudah disiapkan oleh BPRS Jam Gadang dan subsidi dana APBD yang sudah disiapkan pemerintah kota Bukittinggi untuk biaya yang timbul dari pinjaman yang dilakukan nasabah. Input ini merupakan faktor penting dalam menjalankan program karena menentukan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan program. Aktivitas atau proses adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengubah input menjadi output, dimana aktivitas dalam program pemberdayaan UMKM melalui tabungan Utsman ini yaitu memberikan pinjaman kepada UMKM, pembayaran biaya pinjaman melalui subsidi

pemerintah kota Bukittinggi dan pembayaran kembali pinjaman oleh nasabah. Aktivitas dilakukan untuk mencapai tujuan program.

Output atau keluaran merupakan hasil langsung dari aktivitas yang dilakukan, output dalam program pemberdayaan UMKM melalui tabungan utsman ini yaitu peningkatan jumlah UMKM, peningkatan kualitas produk UMKM, peningkatan pendapatan bagi pelaku UMKM dan peningkatan lapangan kerja. Output merupakan hasil akhir dari pelaksanaan program yang dapat diukur dan dinilai. Outcome atau hasil merupakan dampak jangka panjang dari program pemberdayaan UMKM melalui tabungan utsman ini yaitu peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah dilakukan tentang evaluasi dengan menggunakan logic model. Penelitian pertama menunjukkan bahwa program pengembangan agropolitan berdampak positif bagi karakteristik fisik dan sosial, namun berdampak kurang baik bagi karakteristik ekonomi. Studi ini merekomendasikan bahwa diperlukan dukungan kelembagaan yang kuat dalam kegiatan agribisnis di kawasan agropolitan (Agustina, 2017).

Selanjutnya didapatkan hasil penelitian dengan menggunakan logic model maka akan ada serangkaian hubungan yang logis mulai resources sampai pada impact. Rangkaian ini merupakan rangkaian perencanaan program sekaligus evaluasinya. Penyusunan rancangan kegiatan pada program, sekaligus penyusunan instrumen yang akan digunakan pada saat melakukan evaluasi itu. Selain itu, evaluator mengenali dengan baik komponen-komponen program yang akan dievaluasi dan keterkaitan antar komponen. Dengan cara demikian maka evaluasi akan optimal karena betul-betul mengukur komponen atau kegiatan yang dilakukan dan hasil program, sehingga: (1) kecil kemungkinannya terjadi ketidaksesuaian antara input dan output, serta (2) hasil evaluasi betul-

betul dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran yang pada gilirannya mampu meningkatkan soft skills lulusan (Kartowagiran, 2013).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah dilakukan tentang evaluasi kinerja program pemberdayaan UMKM, didapatkan hasil untuk strategi yang tepat digunakan untuk memberdayakan UMKM yang terkena dampak pandemic covid 19 maka menggunakan analisis SWOT dimana aspek yang dilihat adalah aspek permodalan, aspek tenaga kerja dan aspek pemasaran (Covid- et al., 2021).

Selanjutnya penelitian evaluasi dengan model Context (konteks), Input (masukan), Process (proses), Product (hasil) (CIPP) dapat ditarik kesimpulan bahwa semua aspek CIPP dalam katagori sangat baik, dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengevaluasi pemberdayaan UMKM di Kediri. Pemberdayaan UMKM merupakan hal yang penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan oleh sebab itu keefektifan pemberdayaan dapat tercapai apabila terdapat alat evaluasi yang tepat. Disamping itu kelanjutan penelitian yang serupa dapat dilakukan oleh peneliti lain yang memiliki minat yang sama (Forijati, 2014).

Dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian untuk melihat “Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan UMKM Oleh Pemerintah Daerah Studi Kasus : “Tabungan Utsman” Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan logic model”. Adapun alasan lain yang mendasari peneliti mengambil permasalahan ini adalah karena sejauh ini belum ada penelitian yang membahas tentang tabungan Utsman di Bukittinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami evaluasi kinerja program pemberdayaan UMKM di Kota Bukittinggi melalui Tabungan Utsman dengan metode logic model.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami evaluasi kinerja program pemberdayaan UMKM di Kota Bukittinggi melalui Tabungan Utsman menggunakan metode logic model.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian Akuntansi sebagai salah satu bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis

2. Manfaat Praktisi

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja suatu program yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
- b. Untuk menambah pengetahuan serta wawasan bagi peneliti mengenai pentingnya menganalisis kinerja suatu program.
- c. Hasil penelitian ini dapat menambah literature yang dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa UNAND.
- d. Dapat dijadikan sebagai media untuk mengaplikasikan ilmu akuntansi yang telah diperoleh selama perkuliahan serta menambah pengalaman dalam penelitian.

- e. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya yang nantinya akan mengambil permasalahan serupa.

